



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

Ringkasan Capaian

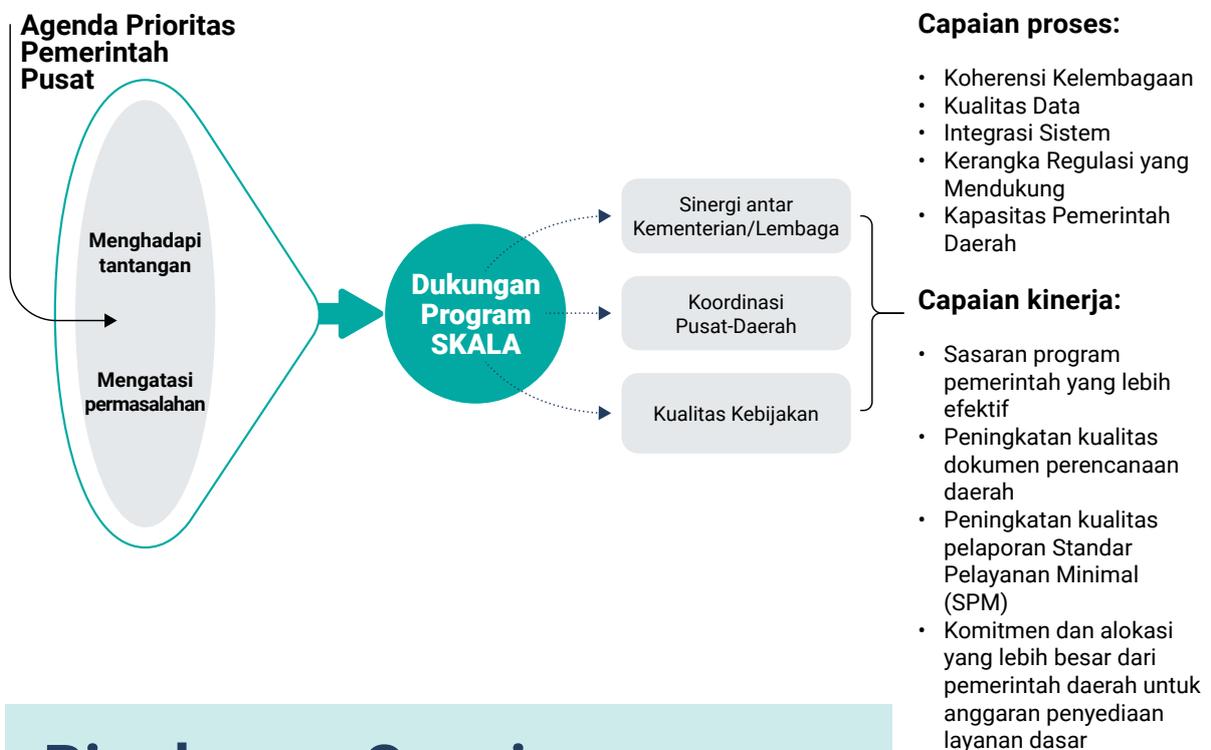
SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar)

Juli – Juni
2023 2024

Pendahuluan

Pada Juli 2023 hingga Juni 2024, Program SKALA mengupayakan penguatan kegiatan strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar inklusif. Penguatan proses tersebut dilakukan melalui perumusan lima pendekatan utama, yakni: **Koherensi Kelembagaan, Kualitas Data, Integrasi Sistem, Kerangka Regulasi yang Mendukung, dan Peningkatan Kapasitas**. Keseluruhan proses ini juga turut didukung dengan upaya yang intensif dalam pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Dokumen ringkasan ini menjelaskan bagaimana proses penguatan tersebut sehingga mampu menghasilkan berbagai perubahan kinerja.

Gambar 1. Memperkuat proses dan kinerja penyediaan layanan dasar yang inklusif



Ringkasan Capaian

Peningkatan sistem perencanaan dan pelaporan menghasilkan beberapa capaian positif. Sebagai contoh, pelaporan e-SPM yang lebih baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp. 266 miliar rupiah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat peningkatan alokasi anggaran SPM yang signifikan, dari 123 juta menjadi 1,5 miliar rupiah dan di Provinsi Kalimantan Utara dari 30 juta menjadi 273 juta rupiah. Provinsi Gorontalo dan NTT juga berkomitmen mendanai pengembangan panduan teknis SPM untuk usulan rencana kerja daerah 2025. Peningkatan ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan e-SPM dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran. Di Provinsi Papua, pemerintah kabupaten mengalokasikan dana yang cukup besar pada tahun 2023 untuk memperluas sistem informasi desa, serta Sistem Administrasi & Informasi Kampung (SAIK+). Sementara itu Provinsi Papua Barat telah berhasil meraih sertifikasi ISO 27001 dalam aspek sistem manajemen keamanan informasi. Selain itu, sebanyak 2.276 lansia di Kabupaten Sorong Selatan menerima bantuan Program PAITUA yang menunjukkan manfaat nyata dari upaya peningkatan sistem tersebut.

Memperkuat Kolaborasi Kelembagaan

Capaian 1

Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk mendukung tata kelola yang efektif. Program SKALA berperan dalam mendukung penentuan prioritas bersama di tingkat Kementerian/Lembaga (KL) dan menghubungkan berbagai kapasitas serta keahlian antar kementerian dalam isu-isu tertentu. Dengan demikian, proses kolaborasi antar lembaga menjadi lebih baik.

Konteks permasalahan: Pemerintah pusat memiliki kerangka regulasi nasional yang kuat. Namun, kurangnya harmonisasi dan keselarasan pelaksanaannya antar K/L, memberikan tantangan dalam efektivitas perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan dasar di tingkat daerah.

Capaian saat ini: Untuk mengatasi hal tersebut, SKALA berperan dalam mendukung proses kolaborasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga pada berbagai inisiatif utama. Dukungan tersebut dilakukan melalui:

- **Menempatkan tantangan teknis sebagai tanggung jawab bersama antar kementerian/ lembaga dan berbagai tingkatan melalui proses perencanaan yang kolaboratif dengan pemerintah.** Sebanyak 12 area prioritas SKALA yang disebut sebagai Rencana Aksi Tematik (TAP), telah dihasilkan berdasarkan diskusi intensif dengan berbagai tingkatan pemerintahan mengenai prioritas utama mitra. TAP dikembangkan guna memberikan pemahaman bersama terkait peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang saling melengkapi.
- **Mendukung koordinasi antara Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam inisiatif pemerintah yang membutuhkan solusi bersama.** Hal ini mencakup perumusan panduan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, memfasilitasi interoperabilitas antara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) Bappenas, serta mendukung penyusunan peraturan Kemendagri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. SKALA juga berkontribusi terkait Indeks Ketimpangan Gender dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia.
- **Membangun pemahaman bersama antar direktorat K/L melalui kolaborasi mengatasi berbagai tantangan.** Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, telah berkoordinasi untuk memberikan dukungan teknis bersama kepada provinsi dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Kolaborasi ini telah memperkuat pemahaman bersama antar kementerian dan berbagai tingkatan pemerintahan.
- **Mendukung pemetaan dan penelusuran alokasi anggaran yang responsif gender.** Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri telah mengembangkan dan menguji panduan terkait pemetaan gender (*gender tagging*) pada anggaran, serta memantau transfer fiskal. Indikator dari Indeks Ketimpangan Gender dan Pembangunan Bappenas digunakan sebagai target dan ukuran oleh Kemenkeu dan Kemendagri untuk memantau hasil perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan. Hasil ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal ke depan untuk mendukung pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif.

Capaian 2

Meningkatkan Kualitas Data

Kualitas data merupakan landasan penting bagi perencanaan pembangunan yang berbasis informasi. Program SKALA berkontribusi dalam pengembangan basis data yang kuat bagi provinsi mitra untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif dan konsisten di berbagai wilayah.

Konteks permasalahan: Pemerintah telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam kebijakan berbasis data melalui inisiatif Satu Data. Namun, kualitas data yang belum optimal menjadi tantangan pemerintah daerah dalam merencanakan penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.

Capaian saat ini: Untuk mengatasi masalah ini, Program SKALA memprioritaskan penguatan proses dan prosedur pada dua area utama sebagai berikut:

- **Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang diperlukan untuk perencanaan yang efektif di tingkat provinsi.** Proses ini telah selesai dilaksanakan di Provinsi Aceh dan masih dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Utara. Program SKALA juga mendukung proses penentuan peraturan perundangan daerah yang dibutuhkan, seperti peraturan gubernur untuk mendukung inisiatif terkait data tersebut.
- **Mendorong pemanfaatan REGSOSEK sebagai sumber data utama untuk perencanaan dan penganggaran di seluruh tingkatan pemerintahan dan kementerian/lembaga.** Dukungan ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga saat peluncuran REGSOSEK, pemberian hak akses kepada 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gorontalo, NTT, NTB, dan Kalimantan Utara, serta terintegrasi dengan sistem informasi desa yang ada. Lebih dari 100 personel pemerintah dilatih sebagai Pelatih Utama untuk memperluas pemanfaatan REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT. Inisiatif ini menjadi acuan untuk analisis GEDSI dalam rencana aksi nasional dan daerah. Tahun lalu, analisis data disabilitas melalui SEPAKAT digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas (RAD-PD) di Provinsi Aceh dan NTT. Dokumen RAD tersebut menjadi acuan utama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang responsif disabilitas di dua provinsi tersebut.

Sistem yang Terintegrasi

Capaian 3

Sistem informasi yang terintegrasi mendukung proses perencanaan melalui bagi pakai dan koordinasi data yang lebih mudah di berbagai direktorat dan tingkatan pemerintahan. Melalui integrasi sistem utama, Program SKALA berupaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan data yang komprehensif untuk perencanaan dan penganggaran.

Konteks permasalahan: Pemerintah pusat memiliki sistem tata kelola yang mapan. Namun, hambatan pelaksanaan dalam berbagi dan mengintegrasikan informasi yang diperlukan di berbagai tahap perencanaan dan penganggaran masih menjadi kendala, terutama di tingkat daerah.

Capaian saat ini: Untuk mengatasi masalah ini, Program SKALA telah mendukung proses integrasi berbagai basis data dan platform analisis yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran. Beberapa capaian utama meliputi:

- **Mendukung integrasi berbagai basis data dan platform analisis yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah** untuk proses perencanaan dan penganggaran, bersama-sama dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu dalam menghubungkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), SIKD, dan SEPAKAT.
- **Memfasilitasi koordinasi antara Bappenas dan Kemenkeu** untuk memasukkan data terperinci terkait belanja kegiatan dan sub-kegiatan ke dalam aplikasi SEPAKAT, guna melakukan analisis yang lebih baik terkait kualitas efektivitas belanja daerah.
- **Mendukung Kemendagri dalam penyusunan rekomendasi teknis untuk mengintegrasikan e-SPM dan SIPD**, guna memasukkan rencana aksi SPM dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- **Mengembangkan kurikulum pelatihan untuk menganalisis data gender menggunakan REGSOSEK**. Hal ini merupakan langkah penting dalam memahami isu gender dan merumuskan solusi sebelum menyusun strategi dan rencana aksi daerah yang responsif gender.

Hasil 4

Memperkuat Kerangka Regulasi yang Mendukung

Keterpaduan kebijakan dapat meningkatkan otonomi fiskal daerah, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan layanan dasar. Program SKALA mendukung dengan memberikan masukan teknis untuk memperkuat peraturan perundang-undangan guna menciptakan kerangka hukum inklusif yang melindungi kelompok rentan dan mewujudkan masyarakat yang setara.

Konteks permasalahan: Indonesia memiliki kerangka regulasi yang beragam dalam mendukung basis hukum tata kelola yang terdesentralisasi. Namun, seringkali peraturan dan keputusan yang diperlukan belum tentu tersedia untuk menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang inklusif di tingkat daerah.

Capaian saat ini: Untuk mendukung keselarasan hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, Program SKALA memberikan masukan teknis guna memperkuat berbagai regulasi dan keputusan, termasuk beberapa hal berikut:

- **Memperkuat peraturan tentang otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah,** seperti PMK No. 33/2024. Upaya ini akan memastikan peraturan yang jelas dan selaras di daerah seperti Provinsi Aceh dan NTB, termasuk panduan tentang pemungutan pajak dan retribusi.
- **Memperkuat peraturan untuk penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial,** terutama di daerah yang memiliki kebutuhan dan konteks tertentu. Misalnya, Peraturan Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya tentang Program PAITUA, dan di Provinsi Maluku tentang Rencana Aksi SPM, telah disempurnakan untuk mencakup kebutuhan masyarakat rentan dengan lebih baik.
- **Memperkuat peraturan terkait integrasi dan pemanfaatan data,** dengan memberikan masukan teknis yang menyelaraskan kebijakan seperti Permendagri No. 5/2024 dengan standar data nasional. Dukungan terhadap inisiatif seperti REGSOSEK di Provinsi NTT dan SIGAP di Provinsi Aceh, akan memastikan bahwa sistem data ini sepenuhnya terintegrasi dan digunakan secara efektif.
- **Meningkatkan regulasi untuk mendorong inklusi sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak.** Misalnya, Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas (RAD-PD), dan rancangan peraturan daerah di Provinsi Maluku tentang hak disabilitas dan pemberdayaan perempuan telah disesuaikan untuk mencerminkan kondisi daerah.

Peningkatan Kapasitas

Hasil
5

Peningkatan kapasitas yang berkelanjutan sangat penting untuk memperbaiki kinerja/capaian. SKALA berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemangku kepentingan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat sipil agar proses perencanaan lebih partisipatif.

Konteks permasalahan: Indonesia memiliki dinamika kebijakan yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman di tingkat daerah terhadap undang-undang yang diperbarui tentang hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif.

Capaian saat ini: Untuk mengatasi hal ini, Program SKALA bekerja melalui kemitraan strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas secara ekstensif untuk memperbaiki tata kelola dan penyediaan layanan dasar di provinsi mitra. Capaian utama meliputi beberapa hal berikut ini:

- **Meningkatkan keterampilan pemerintah daerah dalam tata kelola aparatur pemerintah di wilayah kerja.** Sebagai contoh, lebih dari 400 staf pemda mendapatkan pelatihan teknis tentang SPM, dan 40 diantaranya disertifikasi sebagai manajer investasi dan pengelola Dana Abadi Daerah. Selain itu, sebanyak 3.670 staf pemda dilatih untuk menggunakan REGSOSEK-SEPAKAT.
- **Meningkatkan kapasitas perencanaan dan tata kelola yang inklusif,** terutama di Provinsi Kalimantan Utara dengan memperkuat inisiatif Musrenbang Inklusif. Selain itu, OPD di 36 kabupaten/kota mendapat panduan dan pengawasan provinsi untuk meningkatkan kemampuan dalam memantau penyediaan layanan dasar.
- **Memperkuat keterlibatan masyarakat sipil di wilayah kerja.** Di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Maluku, sebanyak 84 organisasi masyarakat sipil bergabung dalam jaringan masyarakat sipil. Jaringan ini memfasilitasi pertemuan berbagi pengetahuan GEDSI yang secara rutin diadakan setiap dua minggu sekali dengan berbagai OPD, guna memperkuat sinergi dan kolaborasi.



Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Pandangan, opini, dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan hasil karya staf SKALA dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau pandangan resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga-lembaga afiliasinya.

www.skala.or.id